



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

RANWAL RENJA 2025

**RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
(RANWAL RENJA)
TAHUN 2025**



DISUSUN OLEH:
**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Tahun 2025 ini menyajikan informasi rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang disusun dengan harapan agar program dan kegiatan yang akan dilakukan memiliki hasil yang lebih baik dan terukur, sehingga akan menjadi pedoman kerja dalam mewujudkan sarana dan prasarana perhubungan yang aman, nyaman, tertib, dan lancar di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

Penyusunan Ranwal Renja ini juga dimaksudkan sebagai bahan informasi kinerja SKPD sekaligus sebagai bahan evaluasi pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Praya, 22 Januari 2024
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah,



DRS. LALU RINJANI, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19700317 198903 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kab. Loteng	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kab. Loteng	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah.....	21
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH	31
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	34
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah.....	36
3.3 Program dan Kegiatan	38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	42
BAB V PENUTUP	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Rennstra Tahun Anggaran 2023	8
Tabel 2.2	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target yang Direncanakan	12
Tabel 2.3	Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target yang Direncanakan.....	16
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah.....	19
Tabel 2.5	Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	24
Tabel 2.6	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan	30
Tabel 3.1	Permasalahan Pelayanan berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan	33
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan berdasarkan Renstra Dishub Prov. NTB	35
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Tahun 2025.....	38
Tabel 4.1	Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Kemudian Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga menjadi salah satu dasar penyusunan perencanaan program dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) dengan memperhatikan keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip teknokratis (strategis), demokratis, dan partisipatif politis, perencanaan *bottom-up* serta perencanaan *top-down*.

Menyelaraskan dengan amanat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dikerjakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan cara mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja SKPD adalah untuk menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ke dalam program dan kegiatan SKPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan strategis jangka pendek SKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra SKPD. Disebutkan juga bahwa Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun

berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai pedoman rencana kerja yang memuat tentang arah kebijakan, program dan kegiatan, dan hal yang ingin dicapai pada tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah
7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Adapun *output* dan *outcome* untuk perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi urusan perhubungan, dengan mempedomani:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum LLAJ
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Parkir
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum
12. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penetapan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu satu tahun ke depan yaitu Tahun Anggaran 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah untuk menetapkan program dan kegiatan pembangunan yang strategis dalam waktu satu tahun anggaran untuk mencapai sasaran RKPD Kabupaten Lombok Tengah dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang telah ditetapkan. Selain itu agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat terarah dan terukur sesuai dengan kemampuan Dinas Perhubungan maupun Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan yang telah digariskan.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra (Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan, Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan, Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan, serta Implikasi yang Timbul terhadap Capaian Program Renstra), Analisis Kinerja Pelayanan, serta Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan Renja

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi Rencana Kerja dan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, Kaidah-kaidah Pelaksanaan, dan Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah menangani urusan perhubungan dengan jenis pelayanan dasar bidang perhubungan yang meliputi: jaringan pelayanan angkutan jalan, jaringan prasarana angkutan jalan, fasilitas perlengkapan jalan, pelayanan pengujian kendaraan bermotor, penyediaan sumber daya manusia di bidang terminal dan pengujian kendaraan bermotor, serta keselamatan. Seperti yang tertuang pada Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah memiliki fungsi:

1. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan rencana strategis serta program kerja tahunan di bidang perhubungan;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
3. Pengkoordinasian penyusunan RKT, RKA dan Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan;
4. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan program kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Penyelenggaraan peraturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta bimbingan dibidang Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, dan Bidang Angkutan;
6. Penyelenggaraan koordinasi, informasi, dan sinkronisasi tugas-tugas bidang Perhubungan dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait;
7. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain baik instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan atau swasta;

8. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, integritas dan sinkronisasi program-program Dinas Perhubungan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;
9. Pemberian pertimbangan dan penetapan perijinan serta rekomendasi teknis dibidang perhubungan;
10. Pelaksanaan pembinaan manajemen terhadap tugas-tugas bawahan;
11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perhubungan;
12. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah beserta kewenangannya seperti yang tertuang pada Perbup di atas. Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021.

Jumlah program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023 terdiri atas 3 (tiga) program dengan 14 (empat belas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah. Adapun jumlah realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 20.130.989.857,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 20.456.930.942,00 atau mencapai 98,41% dan realisasi fisik sebesar 99,00%.

Berikut akan disajikan rekapitulasi pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2023 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

2.15.02.2.08.01	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Jiwa Berkelembagaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Jiwa Berkelembagaan	48 Dokumen	539.039.400	12 Dokumen	206.270.000	97.990.000	3	34.200.000	3	24.344.000	3	24.040.000	3	24.571.500	12	97.427.500	50	99.53	54	195.317.500	450	56				
2.15.02.2.08	Pelaksanaan Manajemen dan Sistem Lalu Lintas untuk Kabupaten/Kota	Perentase Pelaksanaan Manajemen lalu lintas yang dilaksanakan	40 %	2.334.317.790	19,2 %	496.604.600	40 %	422.675.840	10 %	135.737.000	0	0	10	90870000	40	83814300	40	591.438.300	40	48	888.652.900	53.82					
2.15.02.2.08.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	80 Dokumen	2.334.317.790	13 Dokumen	496.604.600	20 Dokumen	422.675.840	0	135.737.000	5	77.004.000	6	94870000	3	83814300	55	591.438.300	55	92.61	91	814.104.140	758.33				
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Peningkatan Fasilitas Parkir	Perentase lokasi parkir yang teraspal	72,73 %	148.139.980	61,82 %	175.843.000	72,73 %	125.890.000	61,82 %	28.095.000	0	0	61,82	34895000	67,24	31282500	67,24	125.427.500	67,24	54	501.270.500	58.83					
2.15.02.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Peningkatan Fasilitas Parkir Kecamatan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Peningkatan Fasilitas Parkir Kecamatan Kabupaten/Kota	48 Dokumen	148.139.980	12 Dokumen	175.843.000	125.890.000	3	28.095.000	3	31.145.000	3	39905000	3	31282500	3	125.427.500	30	99.63	54	251.317.500	430	46				
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Perentase kendaraan yang laik jalan	97 %	1.398.024.013	86,82 %	231.839.500	97 %	1.389.154.223	43,85 %	30.011.280	0	0	43,72	1302671200	56,96	280921750	56,96	1.638.846.730	56,96	8	1.870.796.230	33.67					
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Peralatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Peralatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	unit	2.188.024.013	45 unit	231.839.500	4 unit	1.389.154.223	0	30.011.280	2	21.242.500	0	1302671200	2	19289250	4	1.377.214.230	100	99.14	2	2.766.368.453	4.44	131			
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Baku Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen Baku Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0 Dokumen	750.000.000	500 Dokumen	150.000.000	6000 Dokumen	0	0	0	0	0	0	6000	150000000	6000	150.000.000	0	100	0	500.000.000	0	40				
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Peralatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Peralatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpeliharaan	unit	540.000.000	0 unit	105.900.000	10 unit	112.945.000	0	0	0	0	0	10	111632500	10	111.632.500	0	98.84	0	224.377.500	42					
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perentase trayek angkutan umum yang dioperasikan	36 %	6.726.488.030	0 %	1.347.257.000	36 %	83.985.000	0 %	16.863.000	0	0	0	24433000	0	31292500	0	83.507.500	0	1	1.430.764.300	425.97					
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	unit	6.726.488.030	3 unit	1.347.257.000	0 unit	83.985.000	0	16.863.000	0	20.913.000	0	24433000	0	31292500	0	83.507.500	0	99.43	0	167.492.500	1				
2.15.02.2.01	Penyediaan Perlongkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Perentase Perlongkapan jalan yang terpasang	8,34 %	31.251.229.510	30,83 %	12.180.264.984	8,34 %	13.099.754.718	94,8 %	4.707.811.177	0	0	21,21	2841434387	44,02	309023681	44,02	13.789.596.741	44,02	81	21.939.861.728	48.83					
2.15.02.2.02.01	Penyediaan Perlongkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang dioperasikan	Jumlah Paket Perlongkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang dioperasikan	Paket	31.010.905.110	12 Paket	12.150.264.984	4 Paket	13.099.754.718	1	4.707.811.177	0	3.477.805.498	0	2833254387	3	3679925681	4	13.698.896.741	100	105.2	1	26.708.851.439	4.33	52			
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlongkapan Jalan	Jumlah Perlongkapan jalan yang direhabilitasi dan Terpeliharaan	20 unit	240.324.400	0 unit	125.140.000	2 unit	80.800.000	3	60.100.000	0	10.200.000	0	10200000	0	10200000	0	90.700.000	100	99.89	25	181.300.000	416.67	76			
Rasio-rasio Capaian Kinerja (%)																	133,78%	43,22%		%	%						
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Rendah									
2.18.01	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYANAN	Perentase Penyerbitan PAS Keyol Angkutan Lintas	40 %	282.432.920	%	0	40 %	70.608.230	80 %	12.678.788	0	11038200	80	21124396	0	19303200	0	74.230.780		109.13	80	74.230.780	26.28			2800	2800
2.18.01.2.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Lintas Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan PAS Keyol Angkutan Lintas	40 %	371.020.190	80 %	0	40 %	70.608.230	80 %	12.678.788	0	0	80	21124396	93	19303200	93	67.034.584	91	36	36	67.034.584	33.73				
2.15.03.2.03.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Lintas Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penerbitan Izin Usaha Angkutan Lintas Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	371.020.190	0 Dokumen	0	12 Dokumen	70.608.230	1	12.678.788	3	13.028.200	4	21124396	4	19303200	12	67.034.584	33,33	94.94	4	137.643.814	0	37			
Rasio-rasio Capaian Kinerja (%)																	100%	25,86%		%	%						
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Rendah									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																											
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program																											
TOTAL BATA-BATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGIARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)																											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																											
Faktor pembatas keberhasilan kinerja:																											
Faktor penguat keberhasilan kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam rencana berikutnya:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Rencana SKPD tahun berikutnya:																											

Dari Tabel 2.1 di atas dapat dikemukakan beberapa hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2023 yaitu sebagai berikut:

a. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target yang Direncanakan

Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak memenuhi target yang telah direncanakan yaitu sebagai berikut:

1. Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat tiga output yang tidak tercapai yaitu:
 - a. pembayaran listrik kantor dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor hanya terbayar selama 11 bulan dari target pembayaran selama 12 bulan karena kurangnya anggaran;
 - b. pembayaran honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak dapat terealisasi karena PPK merangkap sebagai Pengguna Anggaran yang tidak boleh diberikan honor;
 - c. pembayaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) tidak dapat dibayarkan honoronya sesuai dengan arahan dan kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pada Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota terdapat satu output yang tidak tercapai yaitu:
 - pembayaran tagihan listrik PJU hanya terbayar selama 11 bulan dari target pembayaran selama 12 bulan karena kurangnya anggaran;
3. Kegiatan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dengan indikator Persentase Lokasi Parkir yang Tergarap berhasil mencapai 67,24% dari target yang ditetapkan sebesar 72,73%, atau tercapai sebesar 92,45%. Adapun kendala yang dihadapi di lapangan dalam mencapai target ini adalah sebagai berikut:
 - Untuk lokasi parkir di tepi jalan umum, terdapat lokasi parkir yang belum tergarap karena lokasinya yang dianggap kurang potensial dari segi

penerimaan parkir (bersifat musiman), sehingga belum ada juru parkir yang berminat untuk ditempatkan pada lokasi tersebut;

- Untuk lokasi parkir khusus, kendala yang dialami adalah masih dikuasainya lokasi parkir khusus tersebut oleh pihak lain.

4. Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan target berupa "Persentase Kendaraan yang Laik Jalan" sebesar 97% hanya dapat tercapai sebesar 56,96% atau mencapai 58,72%. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

- Kurangnya kesadaran masyarakat akan keselamatan lalu lintas dari sisi kondisi kendaraan;
- Kurangnya sumber daya untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kendaraan yang belum melakukan Uji KIR;
- Terdapat kecenderungan masyarakat untuk menunggu berlakunya Uji KIR secara gratis yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024 (berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah).

d. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Wilayah Kabupaten/Kota.

Realisasi pada target kegiatan ini yaitu berupa "Persentase Trayek Angkutan Umum yang dinormalisasi" yang ditetapkan sebesar 36% tidak dapat tercapai karena beberapa hal sebagai berikut:

- Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum;
- Kurang layaknyanya armada angkutan umum yang ada;
- Banyaknya angkutan umum banyak yang beralih fungsi menjadi kendaraan pribadi;
- Berkembang pesatnya angkutan umum berbasis aplikasi (Grab, Gojek, dsb);
- Tidak tersedia alokasi anggaran untuk melakukan kegiatan normalisasi trayek.

Tidak terpenuhinya beberapa *output* dan target pada beberapa indikator kegiatan di atas tentu saja berimplikasi pada kurang optimalnya kinerja Dinas

Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Hal-hal tersebut perlu menjadi catatan penting pada proses perencanaan dan penganggaran di tahun berikutnya.

b. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target yang Direncanakan

Program/kegiatan yang telah memenuhi target yang direncanakan diuraikan pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2 Program/Kegiatan yang Memenuhi Target yang Direncanakan

No	Program/Kegiatan	Output	Target	Realisasi	%	Ket.
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen RKA	1 dok	1 dok	100	Memenuhi target
		Dokumen DPA	1 dok	1 dok	100	Memenuhi target
		Dokumen RKA-P	1 dok	1 dok	100	Memenuhi target
		Dokumen DPPA	1 dok	1 dok	100	Memenuhi target
		Dokumen RENJA	1 dok	1 dok	100	Memenuhi target
		Dokumen SPIP dan Manajemen Risiko	1 dok	1 dok	100	Memenuhi target
		Laporan Evaluasi Triwulan RENJA	4 dok	4 dok	100	Memenuhi target
		Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Triwulan	4 dok	4 dok	100	Memenuhi target
		Dokumen LKPJ	1 dok	1 dok	100	Memenuhi target
		Dokumen LPPD	1 dok	1 dok	100	Memenuhi target
		Laporan LKj-IP	1 dok	1 dok	100	Memenuhi target
		Buku Profil Perhubungan	1 dok	1 dok	100	Memenuhi target
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Layanan administrasi keuangan	12 bl	12 bl	100	Memenuhi target

No	Program/Kegiatan	Output	Target	Realisasi	%	Ket.
		Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran, dan Tahunan	15 dok	15 dok	100	Memenuhi target
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan BMD Triwulan, Semesteran, dan Tahunan	7 dok	7 dok	100	Memenuhi target
		Laporan Kepegawaian Bulanan, Semesteran, dan Tahunan	15 dok	15 dok	100	Memenuhi target
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	ATK	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
		Terbayarnya tagihan koran lokal	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
		Printer	1 unit	1 unit	100	Memenuhi target
		Kursi Plastik	95 buah	95 buah	100	Memenuhi target
		Peralatan Kebersihan	1 paket	1 paket	100	Memenuhi target
		Peralatan Listrik dan Elektronik	1 paket	1 paket	100	Memenuhi target
		Bahan logistik kantor	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
		Dokumen hasil konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	52 dok	52 dok	100	Memenuhi target
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbayarnya jasa tukang kebersihan kantor	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
		Terbayarnya honorarium Bendahara Pengeluaran	6 bln	6 bln	100	Memenuhi target
		Terbayarnya honorarium Bendahara Penerimaan	6 bln	6 bln	100	Memenuhi target
		Terbayarnya honorarium Pengurus Barang	6 bln	6 bln	100	Memenuhi target
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Terpelihara dan berlakunya STNK kendaraan dinas	45 unit	45 unit	100	Memenuhi target

No	Program/Kegiatan	Output	Target	Realisasi	%	Ket.
	Pemerintahan Daerah					
II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)					
7	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Bahan material PJU	1 paket	1 paket	100	Memenuhi target
		Pemeriksaan Stan Meter PJU	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
		Terbayarnya jasa tukang Teknisi PJU	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
		Terbayarnya jasa tukang Teknisi Traffic Light	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
		Terbayarnya jasa tukang Pengawas Faskes dan PJU di 12 Kecamatan	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
		Terbayarnya jasa tukang Teknisi Pemeliharaan Alat Keselamatan Jalan	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
		Pengadaan dan Pemasangan PJU Tenaga Listrik di Desa Beraim (Dana Aspirasi)	1 paket	1 paket	100	Memenuhi target
		Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas	36 buah	36 buah	100	Memenuhi target
		Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	4 unit	4 unit	100	Memenuhi target
		Pengadaan Lampu PJU + Ornament	1655 buah	1655 buah	100	Memenuhi target
		Pemeliharaan Traffic Light	1 tahun	1 tahun	100	Memenuhi target
8	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penertiban Parkir dan Terminal	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
		Terbayarnya jasa tukang Petugas Pengawasan dan Penertiban Parkir	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
9	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengujian Kendaraan Bermotor	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target

No	Program/Kegiatan	Output	Target	Realisasi	%	Ket.
		Alat Tulis Kantor	1 paket	1 paket	100	Memenuhi target
		Bahan komputer	1 paket	1 paket	100	Memenuhi target
		Peralatan kebersihan	1 paket	1 paket	100	Memenuhi target
		Peralatan listrik	1 paket	1 paket	100	Memenuhi target
		Opgab ke Kecamatan	12 kec	12 kec	100	Memenuhi target
		Pengadaan dan Pemasangan Alat Uji Kendaraan Bermotor	4 unit	4 unit	100	Memenuhi target
		Kalibrasi alat uji	6 unit	6 unit	100	Memenuhi target
		Pemeliharaan alat uji	1 paket	1 paket	100	Memenuhi target
		Pengadaan Sarung Tangan Safety Listrik	2 pasang	2 pasang	100	Memenuhi target
		Pengadaan Palu Besar	2 buah	2 buah	100	Memenuhi target
		Pengadaan Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor	6000 bh	6000 bh	100	Memenuhi target
		Terbayarnya jasa tukang Operator Alat Uji dan SIM PKB	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
10	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengendalian dan pengawasan saat insidentil	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
		MRLI pada event-event nasional/internasional	6 kl	6 kl	100	Memenuhi target
		Survey V/C Ratio	1 kl	1 kl	100	Memenuhi target
		Pengendalian dan pengawasan lalu lintas pada kegiatan Pemda	10 keg	10 keg	100	Memenuhi target
		Pengadaan Senter Lalu Lintas	100 bh	100 bh	100	Memenuhi target

No	Program/Kegiatan	Output	Target	Realisasi	%	Ket.
		Pengadaan Handy Talky + Earphone	10 buah	10 buah	100	Memenuhi target
		Terbayarnya jasa tukang Petugas Pengawasan Saat Insidentil	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
11	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Patroli LLAJ	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
		Terbayarnya jasa tukang petugas Patroli LLAJ	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
12	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Ijin Angkutan dan Jalur Lintas Angkutan Barang	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
		Terbayarnya jasa tukang Supir Angkutan Perintis	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
III Program Pengelolaan Pelayaran						
13	Kegiatan Penerbitan ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Perijinan Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayarant	1 kl	1 kl	100	Memenuhi target
		Patroli keselamatan pelayaran	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
		Terbayarnya jasa tukang Petugas Penertiban dan Pengamanan Ijin Angkutan Laut	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target

Sumber: Subbag. Perencanaan dan Keuangan Dishub Kab. Loteng TA. 2023

c. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target yang Direncanakan

Pada Tahun Anggaran 2022 terdapat program/kegiatan yang tidak target yang direncanakan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3 Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target yang Direncanakan

No	Program/Kegiatan	Output/ Outcome	Target	Realisasi	%	Ket.
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana keselamatan jalan	55,96%	66,11%	118,14	Melebihi target

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Target	Realisasi	%	Ket.
2	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Penerbitan Pas Kecil Angkutan Laut	40%	93%	232,5	Melebihi target

Sumber: Subbag. Perencanaan dan Keuangan Dishub Kab. Loteng TA. 2023

Terlampauinya target pada kedua program tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, target Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan melebihi target yang dianggarkan karena:

- Terdapat pemasangan PJU Tenaga Surya yang bersumber dari Kementerian ESDM sebanyak 75 unit pada ruas jalan Batunyala, Kawo, dan Desa Tumpak;
- Terdapat pemasangan marka jalan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah sepanjang 28.300 meter.

Selain itu dari APBD Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah terdapat penambahan sarana dan prasarana keselamatan jalan berupa:

- Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas sebanyak 36 buah di Kecamatan Praya dan Praya Tengah;
- Pengadaan dan pemasangan cermin tikungan sebanyak 4 buah di Kecamatan Praya dan Praya Tengah;
- Pengadaan dan pemasangan PJU Tenaga Listrik di Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah;
- Pengadaan dan pemasangan alat uji kendaraan bermotor sebanyak 4 unit, sehingga total alat uji yang tersedia sebanyak 10 unit.

2. Pada Program Pengelolaan Pelayaran dengan target berupa Persentase Penerbitan Pas Kecil Angkutan Laut berhasil mencapai realisasi sebesar 232,5% karena adanya program dari Pemerintah Pusat untuk menerbitkan Pas Kecil angkutan laut secara gratis.

Dengan terpenuhinya hampir seluruh program/kegiatan yang telah direncanakan serta terdapat indikator-indikator kinerja yang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan maka diharapkan hal tersebut dapat berimplikasi pada peningkatan layanan kepada masyarakat dalam memenuhi tujuan dan sasaran kegiatan seperti yang tertuang pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, yaitu Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang belum dapat direalisasikan pada tahun 2023 tersebut akan dilakukan pengusulan kembali di tahun mendatang baik melalui usulan APBD maupun APBN.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Pada tahun 2023, pembangunan bidang perhubungan khususnya terkait masalah transportasi diprioritaskan pada tujuan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas.

Secara umum hasil evaluasi kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun Anggaran 2023 diuraikan pada Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

No	Indikator Kinerja berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Dearah	SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi capaian Tahun-			Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Jumlah daerah rawan kecelakaan			n/a	100	98	96	94	n/a	100	98	96	94	
2	VC rasio			0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,35	0,35	0,26	0,25	0,24	
3	Persentase sarpras keselamatan jalan			43,91	48,00	55,96	64,20	72,44	43,91	52,19	66,11	69,00	72,44	
4	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang			6,18	6,88	8,34	9,76	11,17	6,18	20,83	44,02	44,02	50,00	
5	Persentase sarana dan prasarana terminal yang tersedia			35,29	37,25	39,22	43,14	47,06	35,29	37,25	37,25	43,14	47,06	
6	Persentase lokasi parkir yang tergarap			50,91	61,82	72,73	83,64	94,55	50,91	61,82	67,24	83,64	94,55	
7	Persentase kendaraan yang laik jalan			95,00	96,00	97,00	98,00	99	72,10	90,44	55,96	98,00	99,00	

No	Indikator Kinerja berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi capaian Tahun-			Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
8	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan			20,00	20,00	40,00	60,00	80,00	20,00	19,20	40,00	60,00	80,00	
9	Persentase kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas			70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	70,00	70,00	80,52	82,00	84,00	
10	Persentase trayek angkutan umum yang dinormalisasi			-	14	36	57	79,00	-	-	-	14	36	
11	Persentase penerbitan PAS Kecil angkutan laut			-	20,00	40,00	60,00	80,00	-	80,00	93,00	95,00	98,00	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Masih minimnya sumber daya manusia di Bidang Perhubungan;
2. Belum optimalnya pelayanan angkutan umum sebagai penghubung pusat-pusat kegiatan di kecamatan. Permasalahan ini berkaitan dengan tidak beroperasinya sebagian besar trayek yang telah ditetapkan oleh SK Bupati Lombok Tengah dan masih kurangnya pelayanan Terminal Tipe C (Terminal Mujur);
3. Rendahnya *load factor* (faktor muat) penumpang yang menggunakan angkutan umum;
4. Penyediaan fasilitas keselamatan jalan yang masih belum sebanding dengan panjang ruas jalan kabupaten;
5. Belum optimalnya ketersediaan lahan parkir;
6. Angka dan tingkat fatalitas kecelakaan yang masih cukup tinggi;
7. Tidak tertampungnya beberapa kegiatan yang merupakan skala prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah pada APBD, sedangkan pada sisi lain tidak tersedia dana DAK bidang perhubungan sejak lima tahun terakhir.

Tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam meningkatkan pelayanannya yaitu:

- a. Tantangan yang dihadapi antara lain:
 - Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah yang semakin meningkat;
 - Dijadikannya Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Super Prioritas dan adanya event-event internasional pada Pertamina Mandalika International Street Circuit;
 - Meningkatnya rute dan volume penerbangan yang dilayani oleh Bandara Internasional Lombok;

- Besarnya intensitas penggunaan kendaraan pribadi di Kabupaten Lombok Tengah;
 - Rencana penerapan *one gate system* pada pemberangkatan kapal cepat yang melalui dermaga Kuta;
 - Pusat aktivitas yang belum merata.
- b. Peluang yang ada antara lain:
- Adanya regulasi yang memadai;
 - Adanya keterbukaan informasi publik, sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - Adanya sinergisitas terkait strategi dan upaya penanganan masalah transportasi antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Pusat;

Dari permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang yang dihadapi tersebut maka dapat disusun isu-isu strategis yang penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan dan program kegiatan prioritas, yaitu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi yang meliputi:
 - a. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas, terutama pada daerah rawan kecelakaan;
 - b. Kurangnya pengetahuan dan/atau kesadaran masyarakat terhadap kedisiplinan dan ketertiban lalu lintas;
 - c. Kurangnya fasilitas keselamatan jalan;
 - d. Penyediaan lahan parkir yang memadai di beberapa titik rawan kemacetan serta perlunya peningkatan penertiban parkir liar;
 - e. Masih kurangnya sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor;
 - f. Kurangnya kompetensi teknis serta sarana dan prasarana aparatur yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam mendukung kelancaran pelayanan di bidang perhubungan.

2. Belum optimalnya kualitas layanan angkutan, yang meliputi:
 - a. Meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi serta menurunnya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum;
 - b. Fasilitas pendukung transportasi (seperti terminal dan shelter) memerlukan penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi;
 - c. Semakin berkembangnya angkutan tidak dalam trayek (online) di saat menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan Langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat, sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan Kabupaten Lombok Tengah.

Berikut reviu terhadap Rancangan Awal RKPD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah:

Tabel 2.5
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)	
I	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kab. Lombok Tengah	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan	72,44%	13.490.204	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kab. Lombok Tengah	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan	72,44%	19.968.215	
1	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang	50,00%	12.221.406	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang	50,00%	17.457.705	Pemenuhan target melalui adanya bantuan/hibah dari Kemenhub dan Kementerian ESDM serta pembangunan marka jalan oleh DPUPR
	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang	87 buah	12.130.606	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang	2125 buah	17.246.905	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Lombok Tengah	Jumlah fasilitas keselamatan jalan yang terpelihara	5 unit	90.800	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Lombok Tengah	Jumlah fasilitas keselamatan jalan yang terpasang	5 unit	210.800	
2	Kegiatan Pengelolaan Terminal Tipe C	Terminal Mujur	Persentase sarana dan prasarana terminal yang tersedia	43,14 %	50.000	Kegiatan Pengelolaan Terminal Tipe C	Terminal Mujur	Persentase sarana dan prasarana terminal yang tersedia	47,06%	200.000	
	Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Terminal Mujur	Jumlah fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan fasilitas umum yang tersedia	22 buah	50.000	Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Terminal Mujur	Jumlah fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan fasilitas umum yang tersedia	24 buah	200.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)	
3	Kegiatan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. Lombok Tengah	Persentase lokasi parkir yang tergarap	94,55%	189.399	Kegiatan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. Lombok Tengah	Persentase lokasi parkir yang tergarap	94,55%	301.510	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah lokasi parkir yang tergarap	52 lokasi	189.399	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah lokasi parkir yang tergarap	52 lokasi	301.510	
			Jumlah penertiban parkir yang dilaksanakan	12 bln				Jumlah penertiban parkir yang dilaksanakan	12 bln		
			Jumlah gembok parkir yang tersedia	-				Jumlah gembok parkir yang tersedia	10 bh		
4	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPTD PKB	Persentase kendaraan yang laik jalan	99,00%	485.000	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPTD PKB	Persentase kendaraan yang laik jalan	99%	809.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPTD PKB	Jumlah alat uji kendaraan bermotor yang tersedia	10 unit	226.000	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPTD PKB	Jumlah alat uji kendaraan bermotor yang tersedia	10 unit	400.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor	6000 bh	150.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPTD PKB	Jumlah Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor	7000 bh	200.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang terkalibrasi	9 unit	109.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPTD PKB	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang terkalibrasi	9 unit	209.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)	
5	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	80%	388.114	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	80%	500.000	
	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	12 bln	388.114	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	12 bln	500.000	
			Jumlah dokumen kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang tersusun	27 dok				Jumlah dokumen kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang tersusun	27 dok		
			Operasional Forum LLAJ	12 bln				Operasional Forum LLAJ	12 bln		
			Jumlah sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	27 kl				Jumlah sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	27 kl		
6	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kab. Lombok Tengah	Persentase kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas	80%	104.280	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kab. Lombok Tengah	Persentase kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas	80%	200.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem	Kab. Lombok Tengah	Jumlah penertiban lalu lintas yang dilaksanakan	12 bln	104.280	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem	Kab. Lombok Tengah	Jumlah penertiban lalu lintas yang dilaksanakan	12 bln	200.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)	
	Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		Jumlah sosialisasi keselamatan berlalu lintas yang dilaksanakan	5 kl		Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		Jumlah sosialisasi keselamatan berlalu lintas yang dilaksanakan	5 kl		
7	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Persentase trayek angkutan umum yang dinormalisasi	14%	72.005	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Persentase trayek angkutan umum yang dinormalisasi	79%	500.000	
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah pengawasan dan pengendalian angkutan umum yang dilaksanakan	96 kl	72.005	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah pengawasan dan pengendalian angkutan umum yang dilaksanakan	96 kl	500.000	
Jumlah sosialisasi angkutan umum yang dilaksanakan			2 kl	Jumlah sosialisasi angkutan umum yang dilaksanakan				2 kl			
Jumlah survey statis-dinamis yang dilaksanakan			-	Jumlah survey statis-dinamis yang dilaksanakan				1 kl			
Jumlah dokumen kajian trayek perdesaan dan trayek perkotaan yang tersusun			-	Jumlah dokumen kajian trayek perdesaan dan trayek perkotaan yang tersusun				1 dok			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)	
			Operasional trayek rintisan perkotaan	-				Operasional trayek rintisan perkotaan	12 bln		
								Pengadaan sarana transportasi darat (DAK)	135 unit		
II	Program Pengelolaan Pelayaran	Kab. Lombok Tengah	Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	98%	95.776	Program Pengelolaan Pelayaran	Kab. Lombok Tengah	Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	98%	1.500.000	
8	Kegiatan Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Lombok Tengah	Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	98%	95.776	Kegiatan Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Lombok Tengah	Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	98%	1.500.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah penerbitan PAS Kecil angkutan laut	490 bh	95.776	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah penerbitan PAS Kecil angkutan laut	490 bh	1.500.000	
			Jumlah sosialisasi keselamatan pelayaran yang dilaksanakan	-				Jumlah bimtek kru kapal yang dilaksanakan (pelatihan operator speedboat)	2 kl		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)	
			Jumlah dokumen kajian perairan yang tersusun	-				Jumlah dokumen kajian perairan yang tersusun	1 dok		
								Pembangunan rambu suar	2 paket		
								Penyusunan Perbup Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	1 dok		
								Pembangunan pos pengawasan angkutan laut	4 unit		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagaimana fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang utama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Perhubungan dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk peningkatan keselamatan lalu lintas, maka dalam menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tentunya mengacu kepada kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020, Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah akan disampaikan pada Forum Komunikasi Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan usulan dari beragam pemangku kepentingan serta memperhatikan kesepakatan Musrenbang Tingkat Kabupaten serta Reses DPRD atas permasalahan yang terjadi di lapangan yang berkenaan dengan aspek keselamatan lalu lintas. Adapun data-data tersebut akan dihimpun sesuai dengan format Tabel berikut ini:

Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1					
2					
dst					

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 maka Visi dan Misi Kementerian Perhubungan adalah **“Terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”** dengan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatnya integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung SDM yang professional serta antisipatif terhadap potensi bencana;
3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri, dan produktif;
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Adapun Tujuan dari Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya konektivitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5. Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Sedangkan Sasaran Strategis dari Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Terwujudnya konektivitas nasional;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi;
4. Meningkatnya kualitas SDM transportasi yang kompeten;
5. Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi, dan hukum;
6. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian;
7. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari uraian misi, tujuan, dan sasaran Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024 di atas terdapat point yang selaras dengan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yaitu pada point meningkatnya konektivitas, meningkatnya kinerja layanan perhubungan, serta meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi.

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan

NO	Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya konektivitas	Rendahnya load factor (faktor muat) penumpang	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan angkutan umum masih dibawah standar - Meningkatnya jumlah kendaraan pribadi - Berkembangnya angkutan tidak dalam trayek (online) 	Kebutuhan masyarakat akan transportasi
2	Meningkatnya kinerja layanan perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sarana dan prasarana perhubungan - Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi teknis 	Terbatasnya anggaran	Kebutuhan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat
3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Tingginya angka kecelakaan lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi topografi jalan - Kerusakan jalan akibat pelanggaran tonase - Kurangnya fasilitas keselamatan jalan - Kurangnya kesadaran dan kepatuhan pengguna jalan 	Kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam upaya bersama untuk meningkatkan keselamatan transportasi
		Kemacetan (pada lokasi dan jam tertentu)	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kapasitas jalan - Kurangnya jalan alternatif 	

3.1.2 Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dalam rangka mewujudkan konsep rencana pembangunan daerah pemerintah provinsi nusa tenggara barat tahun 2024 - 2026 yaitu **"NTB sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi regional Bali – Nusra yang inklusif dan berkelanjutan"**, Dinas Perhubungan Provinsi NTB turut serta dalam mendukung

konsep rencana pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024 - 2026 pada tujuan pertama **“Terwujudnya Transformasi Ekonomi melalui Peningkatan Produktivitas Daerah Menuju NTB Sebagai Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Regional Bali dan Nusa Tenggara Yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dan tujuan ketujuh **“Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Daerah”**.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTB adalah:

1. Terwujudnya lapangan kerja dan produktivitas daerah;
2. Terwujudnya konektivitas yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan regional.

Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi NTB Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya lapangan usaha subsektor angkutan darat;
2. Meningkatnya lapangan usaha subsektor angkutan laut;
3. Meningkatnya rasio konektivitas daerah;
4. Meningkatnya keselamatan transportasi.

Sedangkan Strategi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan Dinas Perhubungan Provinsi NTB adalah:

1. Menyelenggarakan layanan jaringan dan distribusi transportasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi yang memadai untuk mendukung pariwisata dan event internasional MotoGP;
2. Menyediakan jasa pelayanan sektor transportasi yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
3. Mengembangkan sistem transportasi berkelanjutan yang mengutamakan integrasi antarmoda dan intermodal untuk angkutan umum, jalan kaki, dan sepeda;

4. Menyiapkan regulasi daerah di sektor transportasi yang mendukung pembangunan ekonomi, pengembangan wilayah strategis, dan mengantisipasi isu strategis dinas.
5. Meningkatkan keselamatan lalu lintas melalui upaya meningkatkan manajemen keselamatan jalan, meningkatkan jalan berkeselamatan, meningkatkan sarana transportasi yang berkeselamatan, sosialisasi keselamatan bagi pengguna jalan, dan meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait penangan kecelakaan.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah
Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan
Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya lapangan usaha subsektor angkutan darat	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan ketersediaan angkutan umum; - Rendahnya load factor (faktor muat) penumpang; - Standar infrastruktur transportasi belum optimal; - Tidak tersedianya data dan analisis transportasi yang akurat untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan angkutan umum masih dibawah standar - Meningkatnya jumlah kendaraan pribadi - Berkembangnya angkutan tidak dalam trayek (online) 	Kebutuhan masyarakat akan transportasi
2	Meningkatnya lapangan usaha subsektor angkutan laut	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Lombok Tengah tidak memiliki pelabuhan penyeberangan penumpang dan barang; - Terbatasnya kewenangan pengelolaan laut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014, yang sebelumnya dari 0-4 mil oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan 4-12 mil oleh Pemerintah Provinsi, maka sejak berlakunya UU tersebut maka kewenangan Pemerintah Provinsi menjadi 0 -12 mil 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya SDM serta sarana dan prasarana kelautan yang dimiliki; - Belum adanya regulasi pengelolaan perairan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah 	Perkembangan KEK Mandalika memberikan potensi yang besar terhadap peningkatan arus wisatawan, baik yang melalui darat, laut, maupun udara

No	Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	Meningkatnya rasio konektivitas daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan ketersediaan angkutan umum; - Keterbatasan keterampilan dan pelatihan SDM Sektor Transportasi; - Standar infrastruktur transportasi belum optimal; - Pengelolaan lalu lintas yang belum optimal; - Pengendalian dampak transportasi terhadap lingkungan belum optimal; - Tidak tersedianya data dan analisis transportasi yang akurat untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan angkutan umum masih dibawah standar - Meningkatnya jumlah kendaraan pribadi - Berkembangnya angkutan tidak dalam trayek (online) - 	Kebutuhan masyarakat akan transportasi
4	Meningkatnya keselamatan transportasi	Tingginya angka kecelakaan lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi topografi jalan - Banyaknya resiko berbahaya pada daerah rawan kecelakaan - Kurangnya fasilitas keselamatan jalan - Kurangnya kesadaran dan kepatuhan pengguna jalan 	Kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam upaya bersama untuk meningkatkan keselamatan transportasi
		Kemacetan (pada lokasi dan jam tertentu)	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kapasitas jalan - Kurangnya jalan alternatif 	

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

3.2.1 Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Tujuan merupakan implemementasi/penjabaran Visi-Misi Bupati Lombok Tengah serta telaahan terhadap arah dan kebijakan yang ingin dicapai oleh Kementrian Perhubungan serta Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) sampe 5 (lima) tahun.

Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah merupakan permasalahan pokok bidang perhubungan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah yang dirumuskan dan menjadi fokus dalam pengambilan kebijakan bidang perhubungan dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Lombok Tengah, dimana Visi-nya adalah "mewujudkan masyarakat Lombok Tengah yang beriman, sejahtera, bermutu, maju, dan berbudaya" dengan misi-misi sebagai berikut:

1. Merawat akhlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Mencapai SDM yang cerdas, mandiri, dan unggul;
3. Pelayanan umum pemerintahan yang mudah, cepat, dan bersih;
- 4. Pembangunan ekonomi yang berkeimbangan dan berkelanjutan didukung infrastruktur berkualitas (*merupakan misi yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah*)**
5. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya luhur.

Berdasarkan Visi-Misi Bupati Lombok Tengah, telaahan terhadap Visi-Misi Kementerian Perhubungan dan Visi-Misi Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana diuraikan di atas, serta dengan mencermati kondisi terkini dan isu-isu strategis yang kemudian dirumuskan dan dianalisa, maka dirumuskanlah Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah untuk periode 2021-2026 yaitu "**meningkatnya keselamatan lalu lintas**" dengan indikator jumlah daerah rawan kecelakaan di Kabupaten Lombok Tengah.

3.2.2 Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Sasaran strategis adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measureable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*), dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 adalah **“meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas”** yang diukur dengan VC Rasio (tingkat kejenuhan jalan).

Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun 2025 diuraikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Tahun 2025
Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya keselamatan lalu lintas		Jumlah daerah rawan kecelakaan	100	98	96	94
2		Meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas	VC Rasio (tingkat kejenuhan jalan)	0,35	0,26	0,32	0,31

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah seperti yang telah diuraikan di atas, maka ditetapkan 2 Program dengan 8 Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan prioritas Urusan Perhubungan dalam Rencana Kerja Tahun 2025, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan kegiatan:
 - 1) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - b) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
 - 2) Kegiatan Pengeloan Termnal Penumpang Tipe C, dengan Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
 - 3) Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan

Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
Kewenangan Kabupaten/Kota

- 4) Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 5) Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - 6) Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
 - 7) Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pelayaran, dengan kegiatan:
- 8) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota.

Selain itu ditetapkan 1 Program dengan 8 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan Penunjang dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - b) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Dearah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Renstra, dan dengan memperhatikan isu-isu strategis serta arah kebijakan nasional, maka disusunlah Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 yang dijabarkan pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERHUBUNGAN KAB. LOMBOK TENGAH
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERHUBUNGAN						18.695.270.962,00							21.131.706.645,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						18.695.270.962,00							21.131.706.645,00	
-	-	-						18.695.270.962,00							21.131.706.645,00	
1.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-			-	13.510.203.509,00						-	15.237.189.930,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	12.221.406.109,00				7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan layanan irigasi	-	-	13.564.851.250,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia					12 Unit	12.130.606.109,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	-		13.464.971.250,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara					5 Unit	90.800.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	-		99.880.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-			-	50.000.000,00				7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	-	-	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
		Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara					1 Unit	50.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Muju	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	-			-	189.398.800,00				7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	-	-	208.338.680,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota														

Activate
Go to Selti

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	189.398.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	-		208.338.680,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-			-	485.000.000,00			-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	-	-	564.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				2 Unit	226.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Batuaji	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	-		250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				6000 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Batuaji	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	-		175.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				9 Unit	109.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Batuaji	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	-		139.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	388.113.800,00			-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	-	-	400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	388.113.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	-			-	104.280.000,00			-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	-	-	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>				12 Laporan	104.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	72.004.800,00			-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	-	-	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				12 Laporan	72.004.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-			-	95.776.326,00						-	150.000.000,00	
	2.15.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	95.776.326,00			-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	-	-	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				12 Laporan	95.776.326,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	5.089.291.127,00						-	5.744.516.715,00	
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	39.743.580,00			-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	-	-	60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				15 Dokumen	21.504.180,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	-		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

Activate
Go to Setti

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				26 Laporan	16.239.400,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	-		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
-		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.649.270.237,00			-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	-	-	4.017.134.319,00	DINAS PERHUBUNGAN
-		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				560 Orang/bulan	3.629.213.017,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	-		3.992.134.319,00	DINAS PERHUBUNGAN
-		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	20.057.220,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	-		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
-		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	10.397.220,00			-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	-	-	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
-		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	10.397.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	-		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
-		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	78.549.700,00			-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	-	-	125.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
-		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

Activate
Go to Settings

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	11.980.700,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan layanan irigasi	-		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
-		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	66.589.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan layanan irigasi	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
-		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	291.228.030,00			-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan layanan irigasi	-	-	380.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
-		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				24 Paket	192.510.030,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan layanan irigasi	-		250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
-		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	22.500.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan layanan irigasi	-		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
-		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32 Laporan	76.218.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan layanan irigasi	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
-		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	600.000.000,00			-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan layanan irigasi	-	-	600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
-		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	600.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan layanan irigasi	-		600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

Activate
Go to Seti

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	150.417.900,00			-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	-	-	200.729.490,00	DINAS PERHUBUNGAN
-		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	86.835.900,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	-		95.519.490,00	DINAS PERHUBUNGAN
-		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	63.582.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	-		105.210.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
-		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	269.684.460,00			-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	-	-	336.852.906,00	DINAS PERHUBUNGAN
-		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					45 Unit	169.684.460,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	-		186.652.906,00	DINAS PERHUBUNGAN
-		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	100.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		J U M L A H							18.695.270.962,00						21.131.706.645,00	



Praya, 22 Januari 2024

Dit. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah,

DRS LALU RINJANI, M.Si

NIP. 197003171989031001

BAB V

PENUTUP

Demikian Ranwal Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025. Ada beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan terutama pada daerah-daerah rawan kecelakaan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas
2. Perlunya manajemen dan rekayasa lalu lintas yang didukung oleh sarana dan prasarana jalan maupun terminal yang memadai, terutama pada saat gelaran event nasional maupun internasional di KEK Mandalika
3. Perlunya Langkah-langkah inovatif dalam menyelesaikan permasalahan transportasi/angkutan umum di Kabupaten Lombok Tengah
4. Perlunya pengembangan transportasi laut untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir khususnya nelayan dan sekaligus untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Untuk mencapai keberhasilan dari program Rencana Kegiatan ini, maka capaian kinerja hendaknya dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.

Praya, 22 Januari 2024
Ptt. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lombok Tengah,



DRS. LALU RINJANI, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197003171989031001